



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nomor 180/0006934 tanggal 5 Mei 2023 perihal Penyampaian Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga agar dapat dimasukkan untuk kemudian ditetapkan dalam Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat An. Gubernur Jawa Tengah dari Sekretariat Daerah Nomor 180/0001264 tanggal 24 Januari 2023 perihal penyampaian usulan perubahan program pembentukan perda Tahun 2023, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. Berdasarkan surat dari Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 A/DPRD/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Usulan raperda tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Gubernur dan dapat berbentuk Penambahan Rancangan Perda, Penghapusan Rancangan Perda; dan/atau Penggantian Rancangan Perda;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 19 Juni 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 JUNI 2023

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PRIORITAS TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prioritas Tahun 2023 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas Propemperda Tahun 2023 serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2023 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

Perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan pada Tanggal 12 Januari 2023 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang memprogramkan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 4 (empat) Lanjutan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 4 (empat) Lanjutan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Gubernur dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Gubernur dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka.

Berdasarkan Surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0006934 tanggal 5 Mei 2023 perihal Penyampaian Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, dalam rangka optimalisasi atas skema penyelesaian PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten. Bahwa Pemerintah Daerah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga yang belum direncanakan dan masuk dalam Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Dan berdasarkan Surat An. Gubernur Jawa Tengah dari Sekretariat Daerah Nomor 180/0001264 tanggal 24 Januari 2023 perihal penyampaian usulan perubahan program pembentukan perda Tahun 2023, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Serta surat dari Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 A/DPRD/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Usulan raperda tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan hal tersebut maka perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2023

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, ketentraman serta penanganan konflik sosial di masyarakat di Jawa Tengah, yang notabene sebagai dari daerah yang multi etnis. Atas dasar tersebut maka perlu Menyusun Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

2. Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan sektor pangan, salah satu upaya Jawa Tengah sudah Memiliki BUMD yang bergerak di Bidang pangan, untuk itu Dukungan Regulasi Terhadap Kewenangan Daerah dalam Mengimplementasikan kedaulatan pangan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 BUMD dan bekerjasama dengan 2 BUMN, merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk itu tata Kelola BUMD harus dilaksanakan secara baik dan terukur, untuk itu Jawa Tengah Perlu Menyusun Perda Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah.
4. Air Minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat, mengingat Jawa Tengah, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kekeringan, untuk menjaga ketersediaan Air Minum maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Sistem Air Minum Regional di Provinsi Jawa Tengah.
5. Salah satu pilar berbangsa dan bernegara adalah kedaulatan dalam kebudayaan, Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang memiliki budaya yang menjadi warisan dunia, sehingga dalam melakukan perlindungan dan pengembangan budaya maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Jawa Tengah.
6. Salah satu tujuan dalam penyusunan Produk Hukum Daerah adalah memberikan kepastian hukum. Dimana kepastian hukum salah satunya diwujudkan dalam ketertiban penyusunan lahirnya Undang-Undang 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, sehingga Perlu di susun Peraturan Daerah tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Salah satu pilar kebangsaan adalah pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu dalam rangka membentengi generasi muda dari kelunturan nilai-nilai kebangsaan, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

8. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan pergantian Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Hari Jadi Jawa Tengah.
9. Lahirnya Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa paling lambat tanggal 5 Januari 2024 Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan. Untuk itu maka perlu di susun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Jawa Tengah.
10. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap tata ruang di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan peruntukannya, maka Perlu penyusunan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043.
11. Dalam rangka pengembangan industri Di Jawa Tengah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, untuk itu maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.
12. Dalam rangka Meningkatkan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah BPR-BKK Jawa Tengah, maka perlu dilakukan perubahan kedua terhadap perda nomor 4 tahun 2017 tentang pembentukan Perseroan Daerah BPR-BKK Jawa Tengah.
13. Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah dengan memenuhi modal dasar Badan Usaha Milik Daerah dan menguatkan modal sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
14. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk itu maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis tertentu, dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah.
15. Perlunya pengendalian terhadap penyiaran dan pemberitaan serta dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyiaran, maka diperlukan regulasi terkait Penyelenggaraan Penyiaran.

16. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan pengaturan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, perlu dibuat Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.
18. Lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dibutuhkan kepastian hukum terhadap ketenagakerjaan, sehingga dibutuhkan regulasi terkait Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
19. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, maka diperlukan sebuah regulasi terkait Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah.
20. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu amanatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat 30 tahun.
21. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
22. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

C. DAFTAR PERUBAHAN PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2023

Berdasarkan arah dan kebijakan Perubahan Propemperda 2023, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Perubahan Kedua atas Propemperda Raperda Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

**DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PRIORITAS TAHUN 2023**

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
1.	Penanganan Konflik Sosial	DPRD
2.	Kedaulatan Pangan	DPRD
3.	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah	DPRD
4.	Sistem Air Minum Regional	DPRD
5.	Pemajuan Kebudayaan	DPRD
6.	Pembentukan Produk Hukum Daerah	DPRD
7.	Pendidikan Pancasila. dan Wawasan Kebangsaan	DPRD
8.	Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah	DPRD
9.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	GUBERNUR
10.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043	GUBERNUR
11.	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037	GUBERNUR
12.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah	GUBERNUR
13.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga	GUBERNUR
14.	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis tertentu, dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR
15.	Penyelenggaraan Penyiaran	DPRD LANJUTAN
16.	Pengelolaan Keuangan Daerah	DPRD LANJUTAN
17.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah	DPRD LANJUTAN
18.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	DPRD LANJUTAN
19.	Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR LANJUTAN

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
20.	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	GUBERNUR LANJUTAN
21.	Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	GUBERNUR LANJUTAN
22.	Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah.	GUBERNUR LANJUTAN

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JUDUL RAPERDA
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
3.	APBD Tahun Anggaran 2024

D. PENUTUP

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2023 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2023 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah tahun 2023. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada tahun 2023 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 16 Tahun 2023
 TANGGAL : 19 Juni 2023

**PENJELASAN PERUBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Peraturan Daerah	Penanganan Konflik Sosial	Pencegahan konflik sosial; Penghentian konflik sosial; Pemulihan pasca konflik sosial; Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial; Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat;	Baru		a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial a. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial		a. Penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, ketenteraman serta penanganan konflik sosial di masyarakat di Jawa Tengah; b. Jawa Tengah sebagai daerah yang multi etnis. c. Amanat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun	- Kesbangpol - Dinas Sosial - Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, perlu diatur mengenai penanganan konflik sosial melalui Peraturan Daerah d. Berdasarkan point a, b dan c maka perlu Menyusun peraturan daerah tentang penanganan konflik sosial.			
2.	Peraturan Daerah	Kedaulatan Pangan		Baru		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib		a. ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun	- Dinas Ketahanan pangan - Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah		2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. c. Atas dasar tersebut maka perlu diatur dalam peraturan daerah tentang ketahanan pangan.			
3.	Peraturan Daerah	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah	Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; Kebijakan Umum Mengenai BUMD; Standar Operasional Prosedur BUMD; Organ BUMD;	Baru		PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah		a. pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Daerah b. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan	- Biro Perekonomian - Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Permodalan; Dewan Pengawas/Dewan Komisaris; Direksi; Pegawai BUMD; Penugasan Kepada BUMD; Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD; Teknis Pelaksanaan RUPS / Rapat Tahunan / Persetujuan Pemegang Saham / Persetujuan KPM; Penggunaan Laba; Aktiva Tetap dan					<p>optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah Jawa Tengah, maka diperlukan pengaturan pedoman penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>c. mendasarkan pada ketentuan Pasal 92 dan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>d. Berdasarkan point a, b, c maka perlu Menyusun perda tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan</p>			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Inventaris; Struktur Organisasi dan Tata Kerja; Kerjasama; Tanggung jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Pembinaan Dan Pengawasan.					Usaha Milik Daerah			
4.	Peraturan Daerah	Sumber Air Minum Regional		Baru		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air		a. mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah perlu menjamin pengelolaan air minum dilakukan sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat. b. kebutuhan akan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas,	- Dinas Bina Marga dan Cipta Karya; - Pusdataru	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<p>kontinuitas dan keterjangkauan, maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Jawa Tengah.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah menetapkan kebijakan dan strategi.</p> <p>d. Atas point a, b dan c maka perlu Menyusun perda tentang sumber air minum regional.</p>			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Peraturan Daerah	Pemajuan Kebudayaan		Baru		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan		<p>a. unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan Negara harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila.</p> <p>b. budaya masyarakat Jawa Tengah merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Jawa Tengah, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Biro Hukum - Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<p>memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan.</p> <p>c. Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan Kebudayaan</p> <p>d. Berdasarkan point a, b dan c maka perlu menyusun peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan.</p>			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Peraturan Daerah	Pembentukan Produk hukum Daerah	Bentuk Produk Hukum Daerah; perencanaan; penyusunan Produk Hukum Daerah pembahasan Produk Hukum Daerah; fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi; nomor register; penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi; penyebarluasan; tata naskah	Baru		a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Menteri Dalam		a. Produk Hukum Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. bahwa dalam rangka tertib pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlu disusun peraturan mengenai pembentukan produk hukum	- Biro Hukum, - Bapemp erda	2023	Mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan teknik penyusunan; partisipasi masyarakat; Analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah; materi muatan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan Produk Hukum Daerah; pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;			Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah		c. daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar; c. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan produk hukum daerah maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama pembentukan Produk Hukum Daerah.					sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.			
7.	Peraturan Daerah	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; peran serta Masyarakat;	baru		a. peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik		a. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu Langkah untuk mengenalkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. b. Wawasan kebangsaan merupakan instrumen penting untuk membetengi masyarakat Jawa	Bapemperda Kebangpo l Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pembinaan dan pengawasan; dan kerja sama.			Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan		tengah dari Nilai nilai radikalisme dan premanisme, c. Atas dasar point a dan b maka perlu di susun perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan			
8.	Perda	Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah	Pengaturan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah	V		- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.	V		- Biro Otda setda Provinsi Jawa Tengah - Kesbang pol - Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Peraturan Daerah	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi	Baru		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah		Amanat dari Pasal 94 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah . dan Perda tersebut ditetapkan paling lama 2 (dua) Tahun setelah pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.	BAPENDA	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Peraturan Daerah	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2043	a. Tujuan, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah; b. Rencana struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah; c. Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah; d. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi	Baru		a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana		ada	- PUSDAT ARU, - DINLUK- KAN, - DLHK, - BAPPED A	2023	a. Naskah Akademik disusun tahun 2022 (saat ini proses penyusunan); b. Menggabungkan muatan substansi Rencana Tata Ruang Matra Laut (Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jawa Tengah; e. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.			Tata Ruang Wilayah Nasional; d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; e. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan,					Perairan Dan Pulau-Pulau Kecil) dan matra darat (Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah) ke dalam 1 (satu) Perda Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Peninjauan Kembali Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota Dan Rencana Detail Tata Ruang.					Provinsi Jawa Tengah.
11.	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037	Pembangunan Industri Jawa Tengah		Perubahan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang		a. Rekomendasi LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021 DPRD Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan perlunya melakukan revisi terhadap Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah,	- DPMPTSP ; - Dinlutkan; - Dinakkeswan; - Dinas ESDM, - Dishanpan; - Distanbu	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.		<p>dikarenakan banyak regulasi baru, dan banyaknya daerah Jawa Tengah yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).</p> <p>b. Dalam Penyusunan Perda RPIP Jateng 2017-2037 belum sepenuhnya memasukan regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.</p>	<p>n;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disdik, - Bappeda, - Disnakertrans, - DLHK 		

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<p>c. Terbitnya Permendagri 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan proyeksi dalam pencapaian Sasaran pelaksanaan pada RPIP Jateng khususnya pada Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri</p>			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Provinsi Jawa Tengah (2017 - 2037). e. Dinamika Pembangunan Industri di Jawa Tengah baik dari sisi dukungan Infrastruktur fisik pendukung sektor Industri, Pembangunan Kawasan-kawasan industri baru hingga beberapa proyek berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pasti akan merubah arah pembangunan dan sasaran kinerja Pembangunan Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah.			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Perda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah	a. Menghapus ketentuan pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten b. Menghapus pencabutan perda pendirian PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten c. Menambahkan substansi: - Penyelesaian PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten - Penambahan modal		V	- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan	V		- Biro Perencanaan SETDA - BPKAD; - Bappeda; - Inspektorat - Biro Hukum;	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten			Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah					
13.	Perda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga	- Memasukkan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten untuk mendapatkan penyertaan modal; - Penyesuaian penyertaan Modal pada BUMD Provinsi Jawa Tengah.		V	- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD - Perda Nomor	V		- Biro Perencanaan SETDA - BPKAD; - Bappeda; - Biro Hukum;	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga					
14.	Perda	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis tertentu, dan Batuan di Provinsi Jawa Tengah	a. Perencanaan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;	V		Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan	V		- Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Penanaman Modal	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b. Kewenangan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun			Batubara			Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam dan		

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2022; c. Kewajiban bagi pemegang izin; d. Penerimaan Keuangan Daerah sebagai penerima tugas delegasi; e. Pembinaan dan pengawasan; f. Perlindungan terhadap masyarakat terdampak; g. Pengenaan sanksi.						Penataan Ruang Provinsi Ja; - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah; - Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah; - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; - Badan		

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.		
15.	Perda	Penyelenggaraan Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan terhadap pengawasan program siaran lokal dan berita. - Penguatan kelembagaan penyiaran yang ada di Jawa Tengah. <p>Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk sadar media</p>	V		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. - Peraturan Menteri Komunikasi dan Infor- 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informasi. - Biro hukum - BAPPE DA 	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						masi No-mor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.					
16.	Perda	Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah. - Proses Penyusunan ,pembahasan dan penetapan APBD dan KUA PPAS - Proses pelaksanaan dna penataan usahaan keuangan 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. - Permendagr i 77 tahun 2020 Tentang 	V		<ul style="list-style-type: none"> -BPKAD -Biro Hukum -BAPPEDA -BAPEN-DA 	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			daerah. - Proses pelaporan akuntansi keuangan daerah. - Pertanggung jawaban Anggaran Daerah. - Penyelesaian utang daerah dan pengelolaan kekayaan daerah. - Proses penyelesaian kerugian keuangan daerah			Pedoman teknis Pengelolaan keuangan Daerah.					
17.	Perda	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	- Perlunya perubahan Perda Nomor 20 Ta-		V	1.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah-		V	- Dinas LHK - Dinas PUSDA	2023	-

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Hidup Di Provinsi Jawa Tengah	<p>ahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan regulasi dan perkembangan zaman. Tantangan dan kondisi terkini dalam pengendalian pencemaran air Lintas Kabupaten/ Kota di</p>			<p>Daerah 2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja 3. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>			<p>TARU - Biro Hukum - BAPPE DA - PD terkait lainnya</p>		

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Provinsi Jawa Tengah juga semakin kompleks.								
18.	Perda	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Ketenagakerjaan - Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja - Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja - Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perseelisihan Hubungan Industrial - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 	V		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi - Biro Hukum - BAPPEDA 	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengupahan - Perlindungan Tenaga Kerja - Pembinaan Pengawasan - Kerjasama - Peran Serta Masyarakat 			2014 tentang Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 					
19.	Perda	Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Jawa	Pembinaan dan Pengembangan Pesantren	V		- Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren.	V		- Biro Kesra - Biro Hukum	2023	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tengah				- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren					
20.	Perda	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Berdasarkan UU 32/2009, Memuat rencana 30 tahun tentang : a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam; b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Surat	V		- DLHK - DISPERAKIM; - Dinas PUSDA TARU; - Dinas PU Bina Marga Cipta Karya; - BAPPE-DA; - Biro ISDA; - Biro	2023	-

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			fungsi lingkungan hidup; c. Pengendalian, pemantauan dan penggunaan serta pelestarian sumber daya alam; d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.			Edaran Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.			Hukum; - PD terkait lainnya.		
21.	Perda	Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	1. Perubahan bentuk hukum menjadi PERSERODAs; 2. Perubahan Modal	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah	V	-	- Biro Perekonomian - SETDA - BPKAD; - BPPD; - Biro	2021	-

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dasar; Bidang usaha			diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.			Hukum; - PT SPJT; - PD terkait lainnya.		
22.	Perda	Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah	a. Perubahan bentuk hukum menjadi PERSEROD A; b. Perubahan Modal Dasar; Bidang Usaha.	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. PP Nomor	V	-	- Biro Perekonomian SETDA - BPKAD; - BPPD; - Biro Hukum; - PT Jamrida Jateng; - PD terkait lainnya.	2023	-

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan /Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						54 Tahun 2017 tentang BUMD					

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

